

The Effect Of Budget Management And Transparency On Financial Performance At The Audit Board Of The Republic Of Indonesia Representative Office Of North Sumatra Province

Pengaruh Pengelolaan Anggaran Dan Transparansi Terhadap Kinerja Keuangan Pada Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara

Annisa Larasati ¹⁾; Geby Citra Ananda ²⁾; Aulia ³⁾

^{1,2,3)}Study Program of Management, Faculty of Economic, Universitas Pembangunan Panca Budi
Email: ¹⁾ larasatiica12@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [05 April 2026]

Revised [07 Mei 2026]

Accepted [08 Mei 2026]

KEYWORDS

Budget Management,
Transparency, Financial
Performance.

This is an open access
article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)
license



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengelolaan anggaran dan transparansi keterbukaan informasi keuangan publik terhadap kinerja keuangan pada BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif dan asosiatif. Data yang digunakan merupakan data sekunder berupa laporan keuangan dan laporan kinerja BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara selama periode tahun 2020–2024. Pengelolaan anggaran diukur melalui rasio efektivitas anggaran, transparansi diukur berdasarkan keterbukaan dan ketersediaan informasi laporan keuangan, sedangkan kinerja keuangan diukur menggunakan rasio likuiditas.

ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of budget management and transparency of public financial information disclosure on financial performance at the Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK RI) Representative Office of North Sumatra Province. This research employs a quantitative approach with descriptive and associative research designs. The data used in this study are secondary data obtained from financial statements and performance reports of BPK RI Representative Office of North Sumatra Province for the period 2020–2024. Budget management is measured using the budget effectiveness ratio, transparency is assessed based on the availability and accessibility of financial information, while financial performance is measured using liquidity ratios.

PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan negara merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Dalam konteks Indonesia, keberadaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai lembaga negara yang bebas dan mandiri memiliki peran strategis dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Peran BPK tidak hanya sekadar melakukan audit, tetapi juga memastikan bahwa prinsip akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, serta transparansi anggaran benar-benar terlaksana di berbagai entitas pengelola keuangan negara, baik pusat maupun daerah. Khususnya pada BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara di Medan, fungsi pemeriksaan tidak terlepas dari bagaimana lembaga ini sendiri mengelola anggaran internalnya. Kinerja keuangan BPK tidak hanya mencerminkan efektivitas penggunaan anggaran, melainkan juga menjadi tolok ukur kredibilitas lembaga sebagai pengawas eksternal pengelolaan keuangan negara.

Selain transparansi, pengelolaan anggaran menjadi faktor fundamental yang menentukan kinerja keuangan suatu lembaga publik. Pengelolaan anggaran mencakup proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga evaluasi. Menurut Suci Rahayu (2022) dalam penelitiannya mengenai pengelolaan keuangan daerah, ditemukan bahwa pengelolaan anggaran yang efektif berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kinerja keuangan pemerintah. Namun demikian, permasalahan klasik yang sering muncul pada lembaga pemerintahan termasuk BPK adalah adanya kesenjangan antara perencanaan dan realisasi anggaran. Berdasarkan laporan LAKIP BPK Sumut 2024, terdapat beberapa indikator kinerja yang tidak sepenuhnya tercapai karena adanya keterbatasan dalam penyerapan anggaran dan pengendalian internal. Selain itu, tantangan lain yang dihadapi adalah tingkat transparansi yang masih perlu ditingkatkan, terutama dalam aspek pelaporan keuangan kepada publik. Meskipun laporan kinerja BPK Medan dapat diakses melalui laman resmi, namun keterbacaan dan keterpahaman laporan masih relatif rendah bagi masyarakat awam. Transparansi seharusnya tidak hanya berupa ketersediaan dokumen, melainkan juga penyajian informasi yang mudah dimengerti, sehingga publik dapat ikut serta dalam melakukan pengawasan.

LANDASAN TEORI

Anggaran adalah suatu rencana keuangan yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter untuk jangka waktu tertentu (Mardiasmo, 2018). Dalam konteks sektor publik, anggaran tidak hanya berfungsi sebagai alat perencanaan dan pengendalian, tetapi juga instrumen akuntabilitas dalam mengelola dana publik. Pengelolaan anggaran mencakup seluruh proses mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga evaluasi atas penggunaan anggaran. Menurut Halim (2016), pengelolaan anggaran di instansi pemerintah harus berorientasi pada prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi. Indikator Pengelolaan Anggaran.

Transparansi adalah keterbukaan dalam proses pengelolaan keuangan yang memungkinkan *stakeholders* memperoleh informasi yang jelas, akurat, dan tepat waktu (Sedarmayanti, 2017). Kinerja keuangan merupakan ukuran pencapaian hasil dari aktivitas pengelolaan keuangan organisasi dalam periode tertentu (Harahap, 2015). Dalam sektor publik, kinerja keuangan menjadi dasar penilaian efektivitas, efisiensi, serta akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian deskriptif kuantitatif adalah metode penelitian yang menggambarkan dan menjelaskan suatu fenomena dengan menggunakan angka-angka. Tempat peneliti melakukan penelitian adalah Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, Jalan Imam Bonjol No.22, Madras Hulu, Medan Polonia, Kota Medan, Sumatera Utara 20152, Indonesia. Populasi yaitu Laporan Anggaran dan Transparansi Terhadap Kinerja Keuangan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara. Dan sampel pada penelitian ini menggunakan sampel *Purposive Sampling* karena hanya pegawai tertentu (misalnya bagian keuangan, perencanaan, dan audit internal) yang benar-benar memahami anggaran dan transparansi.

Dalam penelitian ilmiah, istilah variabel merupakan konsep penting yang menjadi dasar untuk membangun hipotesis, instrumen penelitian, hingga analisis data. Variabel dapat dipahami sebagai segala sesuatu yang menjadi objek pengamatan penelitian dan dapat berubah atau bervariasi. Variabel digunakan oleh peneliti untuk melihat hubungan sebab-akibat, perbedaan, maupun pengaruh antar fenomena. Penelitian ini menggunakan data kuantitatif, dimana menurut Sugiyono (2019) adalah data yang berbentuk angka-angka yang diukur menggunakan statistik sebagai alat analisis untuk menguji dan menarik kesimpulan terkait masalah yang diteliti.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Sugiyono (2019) menjelaskan bahwa data sekunder adalah data yang dikumpulkan tanpa interaksi langsung antara pengumpul data dan pihak yang menyediakan data. Sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa laporan historis yang tersedia dalam bentuk publikasi, arsip, atau catatan yang relevan dengan penelitian. Data yang dibutuhkan dapat diperoleh melalui situs resmi/website <https://sumut.bpk.go.id/wp-content/uploads/2025/03/LAKIN-SUMUT-2024.pdf>.

Yang telah merilis laporan serta menyediakan data laporan realisasi anggaran kinerja keuangan yang diperlukan untuk analisis. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Dokumentasi. Sugiyono (2019) menyatakan bahwa dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang berupa buku, arsip, dokumen, angka-angka tertulis, dan gambar-gambar yang dapat mendukung penelitian. Dalam penelitian ini, teknik analisis data terdiri dari beberapa tahapan utama untuk memahami dan menarik kesimpulan dari data yang telah dikumpulkan. Tahap pertama adalah reduksi data, Tahap kedua adalah penyajian data, Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, di mana penulis mencari pola, hubungan, atau tema dari data yang telah disajikan, kemudian diverifikasi untuk memastikan konsistensi dan akurasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Hasil penelitian ini mengambil beberapa sumber dari laporan keuangan tiap tahun dari 2020-2024. Menggunakan perhitungan rasio likuiditas dan rasio efektivitas adalah salah satu indikator penting atas kinerja keuangan adalah sebagai penyusunan dan publikasi Laporan Keuangan Audited tahunan yang dapat diakses oleh publik melalui situs resmi BPK RI Perwakilan Sumatera Utara yang telah diaudit dan dipublikasikan di kanal Laporan Keuangan lembaga tersebut. Berikut gambar dan hasil perhitungan rasio efektivitas anggaran dalam bentuk persenan

Tabel 1. Rasio efektivitas anggaran 2020-2024

Keterangan	2024	2023	2022	2021	2020
Jumlah Kewajiban	Rp. 28,91	Rp.23,87	Rp. 18,46	Rp. 9,20	Rp. 866,750
Jumlah Aset Persediaan	Rp. 8,92	Rp. 8,97	Rp. 8,88	Rp. 8,80	Rp. 882.057
Realisasi Pendapatan Daerah	Rp. 11,77	Rp. 10,54	Rp. 11,18	Rp. 15,23	Rp. 16,18
Kas Awal	Rp. 126,40	Rp. 140,04	Rp. 10,85	Rp. 9,59	Rp. 263,88
Kas Akhir	Rp. 898,12	Rp. 1,55	Rp. 1,64	Rp. 1,36	Rp. 5,90
	Rp. 393,16	Rp. 898,12	Rp. 1,55	Rp. 1,64	Rp. 136.217

Sumber: Olah data pribadi dalam bentuk miliar

Dari data di atas, menjelaskan bahwa realisasi anggaran kewajiban BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp. 866,750 miliar pada Tahun 2020. Dan untuk di Tahun 2021 mengalami penurunan yang cukup besar untuk di kewajiban. Nilai tersebut menunjukkan bahwa realisasi anggaran BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara pada Tahun 2021 mencapai Rp 9,20 miliar. Kenaikkan ada di Tahun 2022 sebesar Rp. 18,46 miliar. Kenaikan di Tahun 2023 Rp. 5,41 miliar. Total yang ada di Tahun 2023 sebesar Rp. 23,87 miliar. Dan untuk kewajiban di Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp. 5,04 miliar atau total asli nya Rp. 28,91 miliar.

Di Tahun 2020 untuk jumlah Aset sangat besar nominalnya,yaitu Rp. 882.057 miliar. Lalu, mengalami penurunan juga sebesar Rp. 8,80 miliar pada Tahun 2021. Tahun 2022 mengalami kenaikan yang tidak begitu besar, sekitar Rp. 8 miliar selisih dari Tahun 2021. Total pada tahun 2022 Rp. 8,88 miliar. Di tahun 2023, kenaikannya sebesar Rp. 8,97 miliar. Tetapi, untuk di Tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp. 8,92 miliar.

Di Tahun 2020, untuk Persediaan sebesar Rp. 16,18 miliar. Untuk di Tahun 2021 mengalami penurunan yang tidak terlalu jauh dari Tahun 2020 sebesar Rp. 15,23 miliar. Dan di Tahun 2022 juga mengalami penurunan sebesar Rp. 11,18 miliar. Tahun 2023 juga terjadi penurunan Rp. 10,54 miliar. Dan terjadi juga kenaikan di Tahun 2024 sebesar Rp. 11,77 miliar.

Realisasi Pendapatan Daerah pada Tahun 2020 sebesar Rp. 263,88 miliar dan di Tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp. 9,59 miliar. Pada Tahun 2022 terjadi kenaikan yang tidak begitu besar, senilai Rp. 10,85 miliar. Pada Tahun 2023, mengalami kenaikan sebesar Rp. 140,04 miliar. Dan pada Tahun 2024 pendapatan daerah nya sebesar Rp. 126,40 miliar.

Kas awal pada Tahun 2020, sebesar Rp. 5,90 miliar. Dan di Tahun 2021 kas awal Rp. 1,36 miliar. Tahun 2022 naik sebesar Rp. 1,64 miliar. Tahun 2023 juga mengalami penurunan Rp. 1,55 miliar. Dan untuk 2024, terjadi kenaikan Rp. 898,12 miliar.

Kas akhir pada Tahun 2020, sebesar Rp. 136.217 miliar. Pada 2021, mengalami penurunan Rp. 1,64 miliar. Dan di Tahun 2022, sebesar Rp. 1,55 miliar. Tahun 2023, juga mengalami kenaikan Rp. 898,12 miliar. Tahun 2024 kas awal senilai Rp. 393,16 miliar.

Tabel 2. Tabel Anggaran APBD Provinsi Sumatera Utara 2020-2024

Tahun	APBD (Rp)
2020	12,97 Triliun
2021	13,06 Triliun
2022	13,49 Triliun
2023	14,14 Triliun
2024	14,83 Triliun

Sumber: Laporan Anggaran Provinsi Sumatera Utara

Tabel 3. Realisasi Anggaran APBD Provinsi Sumatera Utara 2020-2024

Tahun	APBD (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Presentase Realisasi
2020	12,97	12,39	95,54%
2021	12,06	12,01	92,00%
2022	13,49	13,44	99,66%
2023	14,14	14,11	99,82%
2024	14,83	14,38	96,98%

Sumber: Realisasi Anggaran dalam bentuk triliun

Berdasarkan data realisasi APBD Provinsi Sumatera Utara tahun 2020–2024, tingkat realisasi anggaran menunjukkan kinerja yang cukup baik dengan rata-rata realisasi di atas 90%. Pada tahun 2020 realisasi anggaran mencapai angka 95,54%, dan kemudian mengalami penurunan juga di tahun 2021 menjadi 92%. Selanjutnya terjadi peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2022 dan 2023 dengan realisasi masing-masing sebesar 99,66% dan 99,82%. Pada tahun 2024 realisasi anggaran tercatat sebesar 96,98%, yang menunjukkan bahwa sebagian besar anggaran telah digunakan secara efektif untuk mendukung pelaksanaan program pemerintah daerah.

Tingkat realisasi yang tinggi ini mencerminkan bahwa pengelolaan anggaran pemerintah daerah telah dilakukan secara relatif efektif dan efisien. Selain itu, realisasi anggaran yang mendekati target juga menunjukkan adanya perencanaan anggaran yang baik serta pengawasan yang memadai dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah.

Gambar 1 . Realisasi Anggaran BPK Provinsi Sumatera Utara 2020-2024



Sumber: Olah data dalam bentuk persen

Pembahasan

Pengaruh Pengelolaan Anggaran (X1) terhadap Kinerja Keuangan (Y)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran (X1) berpengaruh terhadap kinerja keuangan (Y) pada BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara. Pengelolaan anggaran yang baik, yang mencakup proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi anggaran, berperan penting dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya keuangan lembaga.

Berdasarkan analisis laporan keuangan dan laporan kinerja periode 2020–2024, tingkat realisasi anggaran BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara menunjukkan capaian yang relatif tinggi dan mendekati target yang telah ditetapkan. Hal ini terdapat dari rasio efektivitas anggaran yang berada pada kategori efektif hingga sangat efektif. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perencanaan anggaran telah disusun secara benar dan pelaksanaannya juga mampu mendukung pencapaian tujuan organisasi. Pengelolaan anggaran yang efektif memungkinkan lembaga untuk mengalokasikan dana secara tepat sasaran, meminimalkan pemborosan, serta meningkatkan kualitas pengendalian internal. Dengan demikian, kinerja keuangan lembaga dapat meningkat, baik dari sisi likuiditas maupun kemampuan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Pengaruh Transparansi (X2) terhadap Kinerja Keuangan (Y)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi (X2) berpengaruh terhadap kinerja keuangan (Y) pada BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara. Transparansi dalam pengelolaan keuangan publik, khususnya keterbukaan informasi mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan anggaran, berperan penting dalam meningkatkan akuntabilitas dan kualitas kinerja keuangan lembaga.

Berdasarkan laporan keuangan dan laporan kinerja periode 2020–2024, BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara telah menyediakan informasi keuangan melalui media resmi yang dapat diakses oleh publik. Ketersediaan laporan tersebut mencerminkan adanya keterbukaan informasi sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan. Transparansi ini mendorong terciptanya pengawasan internal dan eksternal yang lebih efektif, sehingga para penggunaan anggaran dapat dikendalikan secara optimal.

Penerapan transparansi yang baik memungkinkan proses pengambilan keputusan keuangan dilakukan secara lebih objektif dan berbasis data, serta mengurangi potensi terjadinya inefisiensi dan penyimpangan anggaran. Kondisi tersebut berdampak positif terhadap kinerja keuangan, yang tercermin



dari kemampuan lembaga dalam mengelola keuangan secara efektif dan berkelanjutan. Hasil penelitian ini sejalan dengan teori *good governance* yang menekankan transparansi sebagai salah satu prinsip utama dalam pengelolaan keuangan sektor publik.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pengelolaan anggaran sangat berpengaruh terhadap kinerja keuangan BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara. Hal ini terlihat juga dari tingkat realisasi anggaran yang relatif naik target setiap tahunnya selama periode 2020–2024. Serta, ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja melalui media resmi menunjukkan adanya upaya keterbukaan informasi kepada publik. Dengan adanya, hasil analisis menunjukkan bahwa kombinasi pengelolaan anggaran yang efektif dan transparansi yang memadai mampu meningkatkan efisiensi, efektivitas, serta akuntabilitas pengelolaan keuangan. Dengan demikian, kedua variabel tersebut merupakan faktor penting dalam menjaga dan meningkatkan kinerja keuangan BPK sebagai lembaga pemeriksa keuangan negara.

Saran

Disarankan untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran, khususnya pada tahap evaluasi yang lebih berbasis data dan indikator kinerja, agar perencanaan anggaran di masa mendatang menjadi lebih akurat dan tepat sasaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2020). *Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2020 – BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara*. Medan: BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara. Diakses dari <https://sumut.bpk.go.id/wp-content/uploads/2021/03/LAK-SUMUT-2020.pdf>
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2022). *Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2022 – BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara*. Medan: BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara. Diakses dari <https://sumut.bpk.go.id/wp-content/uploads/2023/11/LAK-SUMUT-2022.pdf>
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2023). *Laporan Keuangan Audited Tahun 2023 – BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara*. Medan: BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara. Diakses dari https://sumut.bpk.go.id/wp-content/uploads/2024/10/LK-AUDITED-2023_opt.pdf
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2024). *Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024*. Medan: BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara. Diakses dari <https://sumut.bpk.go.id/laporan-tahunan-annual-report/laporan-akuntabilitas-kinerja-bpk-perwakilan-provinsi-sumatera-utara-tahun-anggaran-2024/>
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (n.d.). *BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara*. Diakses 27 September 2025, dari <https://sumut.bpk.go.id/>
- Delefinda, S. (2021). *Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja, Akuntabilitas, dan Transparansi terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Medan* (Skripsi, Universitas Pembangunan Panca Budi). Repository UNPAB.
- Jonner, P., & Situmorang, H. H. (2020). *Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kota Batam*. Universitas Katolik Santo Thomas Medan.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. Sugiyono. (2019). *Statistika untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Indriantoro, N., & Supomo, B. (2018). *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi & Manajemen*. Yogyakarta: BPFE.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Mahmudi. (2019). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Maslufi, L. Z., Maryam, A., & Seno, M. F. (2023). Pengaruh transparansi dan tanggung jawab pengelolaan keuangan sekolah terhadap efektivitas pemanfaatan anggaran sekolah. *Jurnal Bisnis Administrasi dan Akuntansi*. <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jbau/article/view/1494>

- Samplangan, S. K., Yuniarta, G. A., & Sinarwati, N. K. (2022). Pengaruh partisipasi penyusunan anggaran, efektivitas pengendalian intern, akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan pengelolaan keuangan pemerintah daerah terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten Bangli. *Jurnal Akuntansi S1 (Undiksha)*, Universitas Pendidikan Ganesha. Diakses dari <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/S1ak/article/view/6836>
- Rifky, R., Rahayu, S., & Erwati, M. (2021). Pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja pengelolaan anggaran (studi pada BPS Kota dan Provinsi Jambi). *Jurnal Akuntansi dan Riset (JAR)*, Universitas Jambi. Diakses dari <https://online-journal.unja.ac.id/JAR/article/view/13662>
- Adimuntja, R., Setiawan, L., & Karim, A. (2023). Pengaruh akuntabilitas, transparansi, dan pengawasan terhadap kinerja anggaran berkonsep value for money pada BUMD Kota Makassar. *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, Universitas Bosowa. Diakses dari <https://journal.unibos.ac.id/jbm/article/view/5210>
- Murib, A., Layuk, P. K. A., & Kambuaya, M. K. P. (2022). Pengaruh pengelolaan keuangan, akuntabilitas, dan transparansi serta budaya organisasi sebagai variabel moderasi terhadap kinerja keuangan Provinsi Papua. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Daerah (KEUDA)*, Universitas Cenderawasih. Diakses dari <https://ejournal.uncen.ac.id/index.php/KEUDA/article/view/3318>
- Fitria, E., Astriani, D., & Rachpriliani, A. (2023). Analisis penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi terhadap pelaksanaan pengelolaan anggaran berbasis kinerja (studi kasus Bappeda Kabupaten Karawang). *COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting*, Universitas Buana Perjuangan Karawang. <https://journal.ipm2kpe.or.id/index.php/COSTING/article/view/11698>
- Nuha, S. U. (2022). The influence of accountability and transparency on budget performance with the concept of value for money in the Lumajang District Government. *International Journal of Accounting and Management Research (IJAMR)*, Universitas Muhammadiyah Gresik. Diakses dari <https://ejournal.itbwigalumajang.ac.id/index.php/ijamr/article/view/1153>